

PERWAKILAN PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF (STUDI KASUS KEBERADAAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PETAJARAN UTARA PERIODE 2019 – 2024)

Halipah¹, Andi Vita Sukmarini², Syamsu Rizal³

Universitas Fajar^{1,2,3}

Email: ali_slmn@rocketmail.com

Abstract

This is done as an effort to achieve a balance between women and men as well as satisfaction and loyalty to the community that elects the legislators. The results of this study show that women's representation in the legislative field that has been carried out in accordance with Commission II (two) in charge of health, education, agriculture and fisheries has provided assistance in the form of both physical and capital. The role of women in the legislature as representatives of the people certainly embodies the aspirations of the community both from health, education, agriculture and fisheries. Community support is still very strong for Ibu Sujati because with existing programs the community is very helpful in realizing existing needs. With the law related to 30% of the role of women's representation, women are only made a condition to meet the quota, so that political party elections can be carried out, women's limitations due to lack of support from family and community supporters who only look at women in one eye. Women's representation in the legislature has given to the community in improving human resources, what else is seen in PPU has been designated as IKN, the hope of female representatives of the PPU community, especially young men and women not only as spectators but also as part of IKN. The role given as COMMISSION II to ablution. community welfare and improvement of community resources

Keywords: Women, Women's Representation, Member of Parliament

Abstrak

Hasil penelitian ini bahwa Perwakilan perempuan di bidang legislatif yang sudah dilakukan sesuai dengan Komisi II (dua) yang membidangi bidang kesehatan, pendidikan, pertanian dan perikanan telah memberi bantuan baik berupa fisik maupun modal. Peran perempuan di lembaga legislatif sebagai wakil rakyat tentunya mewujudkan aspirasi masyarakat baik dari kesehatan, pendidikan, pertanian dan perikanan. Pendukung masyarakat masih sangat kuat bagi ibu sujati karena dengan program yang ada masyarakat sangat terbantu dalam mewujudkan kebutuhan yang telah ada. Dengan adanya UU terkait 30% peran perwakilan perempuan, perempuan ternyata hanya di jadikan syarat untuk terpenuhi kuota tersebut, sehingga dapat terlaksananya pemilihan partai politik, keterbatasan perempuan di karenakan kurangnya dukungan dari keluarga serta pendukung masyarakat yang hanya memandang kaum Perempuan sebelah mata saja. Perwakilan perempuan di lembaga legislatif telah memberikan ke pada masyarakat dalam peningkatan sumber daya manusia apa lagi melihat di PPU telah di tetapkan sebagai IKN, harapan perwakilan perempuan ibu sujati masyarakat PPU terutama pemuda dan pemudi bukan saja sebagai penonton tapi juga sebagai bagian dari IKN. Peran yang di berikan sebagai KOMISI II untuk mewujudkan. masyarakat kesejahteraan serta peningkatan sumber daya masyarakat

Kata Kunci: Perempuan, Perwakilan Perempuan, Anggota DPRD

PENDAHULUAN

Konsep Pada pasal 8 butir d UU Nomor 10 Tahun 2008 disebutkan bahwa 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai tingkat pusat

sebagai salah satu persyaratan partai untuk dapat menjadi peserta pemilu. Selain itu, Pasal 53 juga menyatakan daftar bakal calon memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Sementara di Pasal 2 ayat (3) disebutkan

pendirian dan pembentukan partai menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Lebih jauh, di Pasal 20 tentang kepengurusan partai disebutkan juga tentang penyusunannya yang harus memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30%. Dengan demikian, maka selayaknya tuntutan kuota 30% terhadap keterwakilan perempuan sesungguhnya sudah secara jelas diamanatkan oleh hukum Indonesia mulai dari lingkup pendirian partai, kepengurusan partai, penyusunan daftar caleg dan keperwakilan di parlemen (Ririn Tri Nurhayati dalam Siti Hariti Sastriyani, 2009 :133).

Dengan lahirnya kebijakan kuota terkait dengan untuk keterwakilan perempuan tersebut mempunyai dasar maupun alasan yang kuat. Keterlibatan perempuan dalam politik merupakan kebutuhan yang penting, karena perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami dengan baik oleh perempuan sendiri. "Kebutuhan-kebutuhan tersebut antara lain adalah kesehatan reproduksi, masalah kesejahteraan keluarga, masalah kesehatan dan pendidikan anak, kebutuhan manusia lanjut usia dan isu-isu kekerasan seksual" (Joni Lovenduski, 2008 :38).

Lahirnya kuota perempuan minimal 30% melalui UU tersebut sebagaimana dijelaskan sebelumnya, menjadi berita baik bagi kaum perempuan. Secara eksplisit UU tersebut telah mengakomodir pentingnya perterwakilan perempuan dalam parlemen supaya perempuan dapat memperoleh akses yang lebih luas dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Hal ini pula dapat menjadi angin segar bagi terwujudnya kesetaraan gender dalam dunia politik.

Di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebanyak 190.000 jiwa dan terdiri dari Empat Kecamatan dari kecamatan Penajam, Waru, Babulu dan Sepaku. Perwakilan rakyat pada tahun 2019 - 2024 berjumlah Dua Puluh Lima (25) Partai Politik yang mana masing – masing dari partai Politik Demokrat, Gerindra, PDIP, Golkar, PKS, PBB, BKB, PAN dan Perindo, dan Perwakilan Perempuan dari Partai Politik

Gerindra atas nama ibu SUJIATI dari Daerah Pilihan Kecamatan Babulu yang merupakan satu-satunya perempuan yang terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

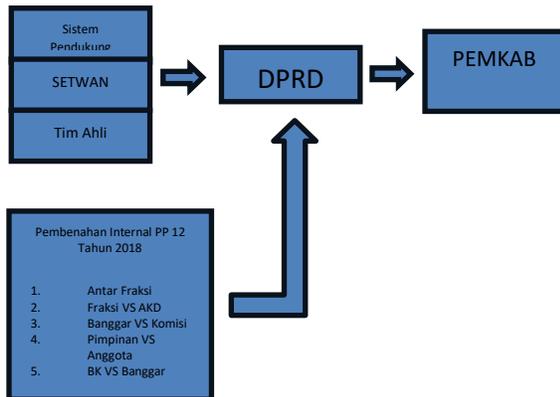
Berdasarkan dengan uraian diatas, maka penulis menyusun tesis dengan judul "Perwakilan Perempuan Di Lembaga Legislatif (Studi Kasus: Keberadaan Anggota Legislatif Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Periode 2019 – 2024)". Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian antara lain: bagaimana peran dan fungsi perempuan di Lembaga Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 -2024 dan bagaimana pendukung dan penghambat perempuan yang menjadi anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 – 2024?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif menitikberatkan pada upaya untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau sebuah fenomena (Creswell, 2019). Penelitian kualitatif memiliki kecenderungan untuk memeriksa proses dan kasus sosial serta menitikberatkan pada interpretasi fenomena yaitu mengenai bagaimana seseorang menciptakan pemahaman dan makna sosial (Neuman, 2014).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan bagian integral dari wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur. Secara administratif pemerintah terbagai dalam 4 kecamatan, 24 Kelurahan dan 23 Desa.



Hasil analisis setelah dilakukan observasi dan wawancara bagi struktural, dan Anggota Legislatif. Bahwa Perwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif dalam Menjalankan Fungsi Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Periode 2019 – 2024, dari Partai Politik Gerindra atas nama ibu Sujati,

1. Perwakilan perempuan di bidang legislatif yang sudah dilakukan sesuai dengan Komisi II (dua) yang membidangi bidang kesehatan, pendidikan, pertanian dan perikanan telah memberi bantuan baik berupa fisik maupun modal.
2. Peran perempuan di lembaga legislatif sebagai wakil rakyat tentunya mewujudkan aspirasi masyarakat baik dari kesehatan, pendidikan, pertanian dan perikanan.
3. Pendukung masyarakat masih sangat kuat bagi ibu Sujati karena dengan program yang ada masyarakat sangat terbantu dalam mewujudkan kebutuhan yang telah ada.
4. Dengan adanya UU terkait 30% peran perwakilan perempuan, perempuan ternyata hanya di jadikan syarat untuk terpenuhi kuota tersebut, sehingga dapat terlaksananya pemilihan partai politik, keterbatasan perempuan di karenakan kurangnya dukungan dari keluarga serta pendukung masyarakat yang hanya memandang kaum Perempuan sebelah mata saja.
5. Perwakilan perempuan di lembaga legislatif telah memberikan ke pada masyarakat dalam peningkatan

sumber daya manusia apa lagi melihat di PPU telah di tetapkan sebagai IKN, harapan perwakilan perempuan ibu Sujati masyarakat PPU terutama pemuda dan pemudi bukan saja sebagai penonton tapi juga sebagai bagian dari IKN.

6. Peran yang di berikan sebagai KOMISI II untuk menjuwudkan. masyarakat kesejahteraan serta peningkatan sumber daya masyarakat.

Hasil Analisis setelah dilakukan observasi dan wawancara bagi pimpinan struktural dan anggota legislatif yaitu: Peran dan Fungsi Perempuan di Lembaga Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Periode 2019-2024. Perwakilan politik perempuan di lembaga legislatif kinimenjadi sebuah keharusan. Hal itu dimaksudkan untuk mengakomodir semua kepentingan masyarakat secara adil, baik laki-laki atau pun perempuan tanpa meminggirkan satu di antara yang lainnya. Oleh karena itu, maka keterwakilan politik perempuan seharusnya mampu terwakilkan secara maksimal, baik dalam aspek kuantitas maupun kualitas. Pitkin membagi keterwakilan atau representasi menjadi empat bentuk yang berbeda. Pertama, representasi otoritas yaitu ketika representator secara legal diberi hak untuk bertindak. Kedua, representasi deskriptif yaitu ketika representator membela kelompok yang memiliki watak politik yang sama. Ketiga, representasi simbolis ketika representasi menghasilkan sebuah ide bersama. Keempat, representasi substantive ketika representator membawa kepentingan "ide" represented ke dalam area kebijakan publik (Hanna Fenichel Pitkin dalam Dwi Windyastuti, www.JournalUnair.ac.id, 9 Februari 2017).

Peran perempuan di DPRD Penajam tidak maksimal, atau kurang baik, disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah karena jumlah dari anggota legislatif perempuan tersebut masih sangat rendah, hal itu menyebabkan tidak di semua komisi ada anggota dewan perempuan. Hal ini menyebabkan banyak persoalan yang

tidak dapat diakomodir sehubungan dengan kebutuhan dan kepentingan perempuan di Sumenep Selain itu, anggota dewan perempuan juga masih minim ilmu, dan tidak aktif dalam berbicara di forum. Kurang, karena jumlah. Paling tidak ada perempuan ditiap komisi. Banyak persoalan yang belum terakomodir. Maka, proses pengambilan kebijakan di tiap komisi, akansulit. Tapi semua itu tergantung person. Anggota DPRD perempuan harus kaya dengan ilmu, berani, dan aktif bicara.

Sehubungan dengan hal di atas, bahwa salah satu penyebab kurang maksimalnya peran anggota dewan Perempuan dalam menjalankan fungsi-fungsinya, yaitu karena mereka kadang sibuk memperjuangkan kepentingan pribadi. Hal itu disebabkan pula karena cost politik yang tinggi, dan anggota dewan cenderung untuk berupaya mengembalikan modal atau biaya politik yang telah dikeluarkan. Peran kurang maksimal, karena salah satunya yaitu kostpolitik dan mementingkan diri sendiri. Masyarakat harus pintar dalam memilih wakil - wakilnya. Anggota dewanmasih tidak sesuai harapan. Pentingnya tingkat kehadiran juga menjadi vital, karena dengan tingkat kehadiran yang baik, paling tidak ada sumbangsi yang kemudian dapat diberikan oleh seorang anggota dewan perempuan.

KESIMPULAN

Perwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif dalam menjalankan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Periode 2019 – 2024, berjumlah satu orang (1) perwakilan dari partai politik Gerindra yang ada di penajam paser utara. Fungsi perwakilan perempuan di lembaga legislatif dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam peningkatan sumber daya masyarakat serta kesejahteraan masyarakat. Perwakilan perempuan hanya sebagai syarat pendaftaran di KPU untuk memenuhi kuota 30% dalam parlemen partai politik bukan sebagai pejuang bagi masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A., & Asmaeny. (2012). Perempuan di Persimpangan Parlemen studi Dalam Perseptif Politik Hukum. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Amin, M. (2014). Golput dan Politik Uang dalam Pemilu. Suara Muhammadiyah, Edisi Nomor 07, Tahun Ke-99, 1-15 April 2014. Hlm. 22-23.
- Andrias, M.A., & Nurohman, T. (2013). Partai Politik dan Pemilu (Analisis Marketing Politik dan Strategi Positioning Partai Politik Pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya). Tasikmalaya: Universitas Siliwangi.
- Anugrah, A. (2016). Keterwakilan Perempuan dalam Politik. Jakarta: Pancuran
- Cangara, H. (2014). Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Cholisin. (2007). Masalah dan Prospek Pembangunan Politik di Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia.
- Creswell, J. W. (2019). Research Design Pendekatan Metode Kualitatif Kuantitatif dan Campuran (Vol. 4). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dian. (2015). Pembangunan Berspektif Gender Melalui Perspektif Gender dalam Hak, Sumberdaya, dan Aspirasi. Jakarta: Dian Rakyat.
- Efriza, dkk. (2016). Mengenal Teori-Teori Politik dari Sistem Sampai Korupsi. Bandung: Nuansa.
- Ella, S. (2016). Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Komparasi Indonesia dan Korea Selatan Indonesian, Vol 1-16 Journal of International Studies (IJS).
- Fakih, M. (2009). Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Feybe, M. P. W. (2016). Keterwakilan Perempuan Dalam Politik di Lembaga Legislatif (Suatu Kajian pada Dprd Kota Tomohon periode 2009-2014), Jurnal, Vol 1-7, Fisip Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

- Firmansyah. (2009). *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas Edisi Revisi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gaffar, A. (2014). *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadenius, A. (2008). *Menang Pemilu Ditengah Ologarki Partai*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haroen, D. (2014). *Personal Branding Kunci Kesuksesan di Dunia Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Haryanto. (2005). *Kekuasaan Elit (Suatu Bahasan Pengantar)*, Yogyakarta: JIP UGM.
- Henrietta, L. M. (2018). *Feminisme dan Antropologi, Terjemahan Tim Proyek Studi Jender dan Pembangunan FISIP UI*, Jakarta: Obor.
- Hertanto. (2017). *Bupati Perempuan Pertama di Lampung dan Kegagalan Calon Petahana pada Pilkada Di Lampung Timur Tahun 2015*, *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi Volume 16, Nomor 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung*.
- Husein, H. (2014). *Pemilu Indonesia: Fakta, Angka, Analisis dan Studi Banding*, Jakarta: Puledem.
- Ihromi. (2015). *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta: Grasindo.
- Ihromi. (2010). *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Jakarta: PT. Inti Elek Media
- Irwan & Zoer'aini, D. (2009). *Besarnya Eksploitasi Perempuan dan Lingkungan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Kantaprawira. (2014). *Indonesia Menggapai Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kantaprawira, R. (2014). *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar, Edisi Revisi*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Karam, A. (2012). *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah, Bukan Sekedar Hiasan*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan dan International IDEA.
- Kartini. (2011). *Pendidikan Politik Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*, Jakarta: Mandar Maju.
- Kotler, P. (2009). *Marketing*. Jakarta: Erlangga
- Kusumaatmadja, S. (2017). *Politik Dan Perempuan*. Depok: Koekoesan
- Lovenduski, J. (2017). *Kendala Kaum Perempuan Menjadi Pelaku Politik*. Jakarta: Pustaka Media Inti.
- Maran & Rafael, R. (2007). *Pengantar Sosiologi Politik: Suatu Pemikiran dan Penerapan Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marbun. (2012). *Implementasi Fungsi Legislatif dalam Kerangka Desentralisasi Otonomi Daerah*. Jakarta: Fokus Media.
- Mardikanto. (2013). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marhaeni. (2011). *Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial*. Semarang: UnnesPress.
- Marijan, K. (2010). *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Kencana. Megawangi, Ratna, 2009, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan Pustaka.
- Merphin. (2011). *Politik ditengah Pergeseran Kepentingan Massa*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Muawanah, E. (2009). *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Naning, R. (2012). *Pendidikan Politik dan Regenerasi*, Liberty: Jakarta.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (Vol. 7)*. Edinburgh: Pearson Education Limited.
- Nirmala & Afrianti, S. (2019). *Studi Partisipasi Politik Perempuan Kabupaten Gorontalo*, Centre for Electoral Reform (CETRO), *Kaucus Perempuan Politik Indonesia (KPPI)*, Jakarta. Nofi Sri Utami, 2016. *Politik Hukum Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif Era Reformasi*, *Jurnal*, Vol 1 14, Fisp Universitas Negeri Semarang.

- Nihyah, J. F. (2013). *Indonesia dan Komunikasi Politik*. Jakarta: Fokus Media.
- Nimmo. (2008). *Political Communication And Public Opinion In America*, California: Goodyear Publishing Company.
- Nimrah, S. (2015). *Perempuan dan Budaya Patriarki Dalam Politik Yogyakarta*: Graha Ilmu.
- Nurhasim & Moch. (2003). *Konflik antar Elit Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Jakarta: Pusat Penelitian Politik-LIPI.
- Nursal, A. (2011). *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nursyahbani, K. (2015). *Masih Dalam Posisi Pinggiran: Membaca Tingkat Partisipasi Perempuan di Kota Surakarta*. Solo: Pustaka Pelajar.
- Novi, Y. A. (2014). *Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014*, Vol 1-12, Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Pamungkas, S. (2011). *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute For Democracy and Welfarism.
- Philips, A. (2008). *The Politics of Presence Edisi Terjemahan dan Revisi*. Bandung: PT Elek Inti Media.
- Putnam, R. D. (2002). *Democracies in Flux: The Evolution of Social Capital in Contemporary Society*, Oxford University Press.
- Rameli, A. (2010). *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan dan Media*, Bandung: Remaja Karya.
- Rauf, M. (2013). *Perempuan Dalam Transisi Demokrasi Dan Globalisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Rizki, P. (2019). *Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*, Vol. III No. V. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Rogers & Storey. (2008). *Political Communication And Public Opinion In America*, California: Goodyear Publishing Company Inc.
- Rohyati. (2009). *Pilkada dan Pengembangan Demokrasi Lokal*. Bandung: Nusa Media Indah.
- Rokhmansyah, A. (2013). *Pengantar Gender dan Feminisme*. Jakarta: PT Inti Elek Media
- Romany, S. (2017). *Perempuan, Kesetaraan, Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Rosady & Ruslan. (2015). *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relation*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rusli. (2006). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widya Pustaka Utama. Rusli, Karim. 2016. *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta: Tiara Wacana. Saadawi N. E. 2011. *Perempuan dalam Budaya Patriarki*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sahdan., Gregorius & Muhtar Habo. (2015). *Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia*. Yogyakarta: IPD.
- Samsul, W. (2007). *Dimensi Kekuasaan Negara Indonesia Teori Perwakilan*. Jakarta: Grasindo.
- Saragih, B. (2018). *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum*, Jakarta: Media Pratama
- Sastropetro. (2014). *Partisipasi Suatu Tinjauan Umum*. Yogyakarta: Liberty. Soetjipto, Ani Widyan. 2015. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Buku Kompas.
- Subono, N. I. (2013). *Wanita dan Partisipasi Politik*. Penerbit Yayasan Jurnal Wanita dan The Japan Fondation.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R dan D*, Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (2014). *Kerangka Analisis Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta:
- Surbakti & Ramlan. (2012). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widya Pustaka Utama.

- Syaiful Munjani Research Center (SMRC). 2014. Jakarta. Mursal Maherul, 2019, Analisis Penyebab Rendahnya Tingkat Keterpilihan Perempuan dalam Upaya Representasi Politik Perempuan pada Pemilu Tahun 2014, Vol. III No. V, Jurnal FISIP Universitas Indonesia.
- Silvia, N. N. (2014). Kedudukan Perempuan Minangkabau dalam Perspektif Gender, Jurnal, Vol 1-6, Fisipol Universitas Andalas.
- Sri, Z. C. (2019). Perkembangan Keterwakilan Politik Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat (Studi Komparatif Kebijakan Affirmative Action Periode Pemilu Legislatif 2004-2014), Vol. 2 No. 2, Jurnal Fisipol Universitas Andalas, Sumatera Barat.
- Totok, I. (2019). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Rendahnya Tingkat Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Mojokerto 2014, Vol. 2 No. 1, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Ukhti, R. (2016). Implementasi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Salatiga, Jurnal, Vol 1-9, Fisipol, Universitas Negeri Semarang.
- Utomo, Paring. G. (2009). Komunikasi Politik Calon Legislatif Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Blitar. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Pers.
- Wijaya, H. (2017). Perempuan dalam Pusaran Politik dan Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka pelajar.